

## **Nekrokultura PLN**

### **Teuku Kemal Fasya**

Awalnya saya ingin menjadikan hal ini sebagai masalah personal saja dengan surat pembaca. Namun karena problem yang saya hadapi ini berdampak publik, maka opini ini bisa mewakili keresahan publik yang kerap tak bernama ketika berhadapan dengan perusahaan yang umurnya seriwayat dengan bangsa ini.

Kasus yang kami alami ketika akan membayar listrik di rumah ibu saya di Gampong Deunong, Darul Imarah, Aceh Besar pada bulan Februari 2016. Kami rumah itu telah kerap kosong selama satu setengah bulan karena ibu telah pindah ke rumah Kp. Mulia Banda Aceh, maka asumsi tagihan akan murah. Namun alangkah kagetnya ketika kami harus membayar Rp. 400-an ribu – jauh lebih mahal dibandingkan bulan-bulan biasa ketika rumah itu masih berpenghuni dan listrik digunakan maksimal.

Kasus kemudian berulang pada bulan Maret 2016. Tagihan masih sebesar bulan lalu, padahal berarti sudah dua bulan setengah rumah itu nyaris kosong. Adik saya mengecek pencatatan di rekening pembayaran tidak sesuai dengan penggunaan riil. Kami melakukan komplain ke unit penagihan. Ternyata memang ada jurang antara pencatatan yang diasumsikan dilakukan akhir Februari dengan penggunaan berjalan. Ketika adik saya membawa bukti foto penggunaan pada pertengahan Maret, terdapat selisih 302 KWH (tertera 32.615 tapi yang harus dibayarkan sesuai catatan tagihan adalah 32.917). Dengan tarif dasar listrik yang telah mengalami revisi untuk tipe rumah tangga rumah kecil-menengah (R-1/TR sampai dengan 2200 VA) adalah Rp. 1.355.29 perKWH maka terjadi surplus Rp. 409.000,-. Berarti sesungguhnya kami tidak perlu membayar pada bulan ini. Namun anehnya komplain tidak didengarkan, malah petugas menganjurkan untuk menggunakan listrik pra bayar ke depan jika lunas tunggakan.

### **Cacat Sistemik**

Dari kasus ini – dan mungkin dihadapi banyak orang lain– terlihat bahwa PLN semakin mundur kinerjanya sejak ditinggalkan sang reformis : Dahlan Iskan. Secara kasus, ada beberapa cacat kinerja yang ditunjukkan oleh PLN.

*Pertama*, sistem pencatatan manual yang dilakukan selama ini tidak dilakukan dengan benar. Petugas pencatatan dalam kasus ini “tidak bekerja” dan hanya menggunakan perkiraan kebiasaan

(*historical record*) dan bukan penggunaan yang riil. Di masa DI, ketika muncul komplain takkesesuaian harga bayar, segera dikoreksi sehingga tidak mengorbankan pelanggan.

*Kedua*, buruknya proses pencatatan setimbang dengan cacat mutu layanan. Jika di media sosial dan media massa, gerutuan publik atas kinerja PLN telah mencapai “puncak kata-kata”, maka normanya ada hal yang diubah dan diperbaiki. Namun PLN tidak menunjukkan adanya perubahan budaya korporasi (*corporate culture*) di era semakin modern ini. Kasus listrik di Lhokseumawe misalnya, mati dua-tiga kali seminggu adalah “maklum” dan adat. Yang agak luar biasa ketika di hari-hari terakhir, pemadaman listrik meningkat 4-5 kali seminggu dengan durasi pemadaman lebih 4 jam. Itu penanda budaya korporasi tidak berubah..

*Ketiga*, jika pemadaman listrik hampir seperti daerah konflik Suriah, Irak, Palestina, atau Yaman, maka seharusnya ada kompensasi yang diterima oleh konsumen atas ketidakpuasan layanan. Yang terjadi malah PLN semakin bebal dan monopolistik sehingga kasus-kasus tidak lagi dianggap permasalahan (bukan lagi kasus tapi telah melembaga). Dan anehnya, harga bayar semakin mahal meskipun TDL telah mengalami revisi berkali-kali seturut dengan anjloknya harga minyak dunia. Listrik kita masih sangat konvensional, menggunakan bahan bakar fosil pada sebagian besar produksi.

Kasus protes publik terkait dengan buruknya pelayanan lembaga negara (termasuk BUMN) yang memiliki kanal solutif sesuai UU No. 37 tahun 2008 malah tidak *maknyus*. Posisi tawar warga sebagai pengguna layanan tertekuk ketika berhadapan dengan PLN seperti kasus di atas. Padahal di sini lembaga seperti Ombudsman bisa bergerak secara proaktif dari *kasus* yang telah menjadi *fenomena* ini untuk diangkat ke ranah hukum. Rekaman historis oleh banyaknya mantan direktur PLN menjadi tersangka hingga terpidana kasus korupsi menunjukkan ada budaya kematian (nekrokultura) yang menjerat lembaga penyuplai energi negara itu. Kasus tolak-tarik pembelian suplai listrik dari PT Lafarge Cement Indonesia (LCI) dengan PLN Aceh – seperti diungkap pengamat ekonomi Rustam Effendi (*Serambi*, 19 Maret) – menunjukkan ada mafia yang bergentayangan sehingga PLN secara kelembagaan terus “kesurupan” dan belum sembuh.

### **Gigantisme Semu**

Secara umum, gagasan reformasi PLN telah dimunculkan banyak pihak. Jusuf Kalla pernah memberikan analisis makro penyelesaian problem PLN, baik untuk ketahanan listrik nasional sebesar 35 ribu MW hingga efisiensi biaya produksi dan otomatis memengaruhi harga jual ke publik yang berdampak pada terpacunya ekonomi di tingkat nasional (Jusuf Kalla, “Solusi untuk Kelistrikan Kita”, *Kompas*, 3 Maret 2014). Namun ide tampak terlalu mewah (atau malas) untuk direalisasikan dalam praksis kebijakan dan semangat kerja.

Pengalaman kita bersama PLN hari-hari ini semakin buruk. Upaya deversifikasi energi terbarukan semisal pembangunan PLTA, PLTU, bahkan pusat listrik tenaga surya hingga sampah yang kini mulai dilakukan secara mandiri oleh Jokowi Centre di Tangerang, tidak berangkat dari kesadaran PLN secara internal, tapi kegusaran yang mulai dirasakan oleh pihak luar. Jika kuasa pengelolaan listrik didesentralisasi semisal pengelolaan listrik oleh publik yang disubsidi oleh negara, atau pengadaan panel surya secara terjangkau, atau pengelolaan sumber air dari hutan komunitas untuk listrik, maka akan terlihat bekas tamparannya bagi PLN.

Pertanyaannya kenapa PLN sulit berubah? Yang terlihat publik adalah karena perasaan besar diri (dan kepala) atau gigantisme, sehingga merasa tak ada yang berhak mengelola energi listrik kecuali PLN. Jika keran monopoli dipatahkan dan kuasa publik dibolehkan mengelola, mungkin PLN akan terpana oleh kelambanannya mereformasi diri. Perasaan serba besar karena tidak ada saingan bukan hanya dirasakan oleh BUMN non-kompetitor seperti PLN, tapi juga birokrasi dan lembaga pendidikan.

Ketika dulu belum ada saingan, Universitas Syiah Kuala merasa sebagai raksasa pendidikan tinggi di Aceh. Sejak 2001 Universitas Malikussaleh muncul sebagai universitas negeri, maka ia merasa ada penantang serius. Demikian pula seterusnya, ketika Unimal merasa besar (kepala) sebagai penguasa pesisir timur Aceh, tapi ketika Universitas Samudera dan Universitas Teuku Umar telah menjadi negeri, muncul pula ISBI (Institut Seni dan Budaya Indonesia) Aceh di Jantho, dan sebentar lagi Universitas Al Muslim dan Universitas Gajah Putih, maka Unimal pun akan tergilas kalau tidak berinovasi dan memperbaiki diri. Dia akan sendu sendirian tertinggal di tikungan oleh kecepatan kampus-kampus baru menawarkan harapan, perubahan, dan bukti konkret.

Tanpa harus diminta, PLN seharusnya segera berubah. Julukan sebagai “Perusahaan Lilin Negara” karena terseok-seok pada lorong mafia dan korupsi, termasuk buruknya layanan publik harus segera diperbaiki. Atau? Perusahaan itu akan menerima kutukan kematian budaya: menjadi zombie yang berwajah buruk dan bergerak lamban.

Teuku Kemal Fasya, Dosen antropologi Universitas Malikussaleh.

*Serambi Indonesia*, 21 Maret 2016.